

# Pengaruh edukasi pada calon sarjana hukum mengenai peran visum et repertum psikiatrikum dalam memahami kasus kekerasan = The effect of education for law students about visum et repertum psikiatrikum towards understanding violence cases

Anthonius Yongko, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20499390&lokasi=lokal>

---

Abstrak

## <b>ABSTRAK</b>

Pendahuluan: Badan Pusat Statistik (BPS) memperoleh peningkatan pada korban kekerasan dari 14,33% menjadi 43,58% pada rentang tahun 2012 hingga 2015. Informasi tersebut mengindikasikan suatu masalah dalam tata laksana kekerasan Indonesia saat ini. Dalam menghadapi kasus kekerasan, pihak hukum akan memerlukan psikiater untuk mengkaji korban dan pelaku terlebih dahulu yang dilaporkan dalam Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP). Akan tetapi, belum diketahui pemahaman pihak hukum mengenai peran VeRP dalam sistem peradilan Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengetahuan calon sarjana hukum terhadap penggunaan VeRP dalam kasus kekerasan serta pengaruh edukasi berupa kuliah terhadap pengetahuan calon sarjana hukum.

Metode: Desain studi adalah kuasi-eksperimental dengan intervensi dalam bentuk kuliah. Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia semester enam. Perubahan tingkat pengetahuan diamati dengan kuesioner pretest-posttest sebelum dan sesudah kuliah. Hasil diuji dengan T-test berpasangan dan Wilcoxon sesuai normalitas data.

Hasil: Perbedaan antara pretest dan posttest nilai keseluruhan kuesioner meningkat secara signifikan ( $p < 0.001$ , CI 95% = 2.34-6.28). Terdapat peningkatan signifikan pada nilai pertanyaan teori ( $p < 0.001$ ) dan nilai pertanyaan studi kasus ( $p = 0.031$ , CI 95% = 0.21-4.21).

Kesimpulan: Edukasi berupa kuliah mampu meningkatkan pengetahuan populasi calon sarjana hukum dalam pemahaman Visum et Repertum Psikiatrikum dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus kekerasan.

Metode: Desain studi adalah kuasi-eksperimental dengan intervensi dalam bentuk kuliah. Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia semester enam. Perubahan tingkat pengetahuan diamati dengan kuesioner pretest-posttest sebelum dan sesudah kuliah. Hasil diuji dengan T-test berpasangan dan Wilcoxon sesuai normalitas data.

Hasil: Perbedaan antara pretest dan posttest nilai keseluruhan kuesioner meningkat secara signifikan ( $p < 0.001$ , CI 95% = 2.34-6.28). Terdapat peningkatan signifikan pada nilai pertanyaan teori ( $p < 0.001$ ) dan nilai pertanyaan studi kasus ( $p = 0.031$ , CI 95% = 0.21-4.21).

Kesimpulan: Edukasi berupa kuliah mampu meningkatkan pengetahuan populasi calon sarjana hukum dalam pemahaman Visum et Repertum Psikiatrikum dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus kekerasan.

<hr>

## <i><b>ABSTRACT</b></i>

Introduction: The Center of National Statistics (BPS) found an increase in violence rate from 14,33% to 43,58% between the year 2012 and 2015. This indicates a problem in Indonesian violence management to

this day. When handling violence cases, jurist may require the help of forensic psychiatry to assess the victims and suspects of the case. These findings are reported in a Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP). However, there is no information about the jurists knowledge on the use of VeRP. This study aims to obtain information on law students knowledge of VeRP and how lecture affects the knowledge of VeRP in law students.

Method: A quasi-experimental study design with lecture as intervention is conducted on sixth-semester Universitas Indonesia Law Students. Results obtained twice (before and after lecture) in pretest-posttest questionnaire are analysed with paired t-test and Wilcoxon depending on normality.

Result: There is a significant increase in overall score ( $p < 0.001$ , CI 95% = 2.34-6.28) and the scores in both question groups. [theoretical group ( $p < 0.001$ ); case study group ( $p = 0.031$ , CI 95% = 0.21-4.21)]

Conclusion: Lecture can affect the knowledge of law students about the use of Visum et Repertum Psikiatrikum to identify and prosecute violence cases.